

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keselamatan pasien merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. *World Health Organization* (WHO) memperkirakan bahwa 1 dari 10 pasien di negara berkembang mengalami insiden keselamatan pasien selama menerima pelayanan kesehatan, dengan lebih dari 50% kejadian tersebut sebenarnya dapat dicegah (WHO, 2024). Di Indonesia, upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan difokuskan melalui penerapan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 11 Tahun 2017 dan menjadi bagian dari standar akreditasi Puskesmas berdasarkan Kepmenkes No. 165 Tahun 2023 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Pelaksanaan enam Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) di Puskesmas di Indonesia menunjukkan capaian yang sangat bervariasi antar wilayah. Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Kota Surabaya, rerata pencapaian seluruh indikator Sasaran Keselamatan Pasien hanya mencapai 74,03%, jauh di bawah target 100% sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Hardy, Jati, dan Setyaningsih, 2023). Penelitian serupa di Puskesmas pada tahun 2020, menunjukkan bahwa hanya 52,5% petugas yang melakukan identifikasi pasien dengan benar menggunakan minimal dua identitas, dan hanya 15% petugas yang menerapkan prosedur cuci tangan sesuai standar. Bahkan, kegiatan pencegahan risiko pasien jatuh tidak dilaksanakan sama sekali (Hadiarto, Ekasari, dan Yulyani, 2022). Sebaliknya, Puskesmas di Kota Serang pada tahun 2019 mencatat pencapaian yang cukup baik dengan rata-rata implementasi SKP antara 96–98% berdasarkan evaluasi triwulan yang dilakukan secara rutin (Saputra dan Rizky, 2023).

Perbedaan tingkat keberhasilan ini mengindikasikan adanya kesenjangan implementasi SKP yang cukup mencolok antar Puskesmas. Beberapa faktor yang memengaruhi capaian tersebut antara lain adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memahami prinsip keselamatan

pasien, budaya keselamatan yang belum terbentuk, dan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi internal. Dengan demikian, meskipun terdapat Puskesmas yang telah menunjukkan praktik terbaik, sebagian besar fasilitas kesehatan primer masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan SKP secara konsisten dan menyeluruh.

Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan capaian Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) di Puskesmas telah dilakukan melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan program pembinaan. Salah satu regulasi utama yang menjadi dasar pelaksanaan keselamatan pasien adalah diterbitkannya Kepmenkes No. 165/2023, pemerintah menetapkan kerangka akreditasi baru yang menjadikan Sasaran Keselamatan Pasien (Standar 5.3) dan Pelaporan Insiden & Budaya Keselamatan (Standar 5.4) sebagai fondasi penting dalam penilaian mutu Puskesmas. Melalui Standar 5.3, Puskesmas wajib mengimplementasikan proses identifikasi pasien dengan benar (menggunakan minimal dua parameter identitas) serta memperkuat komunikasi efektif dengan format baku seperti SBAR dan read-back, guna mengurangi risiko kesalahan klinis. Sementara itu, Standar 5.4 mewajibkan adanya sistem pelaporan insiden keselamatan (mulai dari near-miss hingga sentinel event) dilengkapi analisis akar masalah (RCA) dan tindak lanjut perbaikan, ditujukan untuk membentuk budaya keselamatan yang proaktif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Upaya ini didukung oleh pembentukan Tim Mutu Puskesmas yang mencakup koordinator keselamatan pasien, manajemen risiko, dan pengendalian infeksi, dengan tanggung jawab menyusun program mutu, memantau pelaksanaan, dan memastikan keberlanjutan kegiatan keselamatan pasien. Untuk mendukung tata kelola tersebut, akreditasi dibuat wajib setiap lima tahun, sesuai Kepdirjen Yankes 2023, sebagai instrumen pembinaan, bukan sekadar formalitas sertifikasi, sehingga memberikan tekanan bagi Puskesmas untuk mempertahankan komitmen mutu secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan audit internal, pemantauan triwulan, dan pendampingan melalui Dinas Kesehatan daerah untuk memperbaiki disparitas implementasi (khususnya di wilayah 3T) serta

meningkatkan kesadaran staf terhadap budaya pelaporan dan budaya belajar dari insiden.

Dengan sinergi regulasi, sistem akreditasi yang diperbarui, dan peran aktif tim mutu serta pelaporan insiden, pemerintah menegaskan komitmen untuk meningkatkan keselamatan pasien di tingkat primer. Meskipun tantangan seperti ketersediaan SDM terampil dan budaya pelaporan masih perlu ditangani, kerangka regulasi ini menjadi fondasi kuat dalam mendorong Puskesmas agar melakukan praktis keselamatan pasien yang sistematis dan berkelanjutan.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) di Puskesmas umumnya masih berfokus pada evaluasi capaian indikator secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SKP di masing-masing sasaran. Misalnya, beberapa studi di Puskesmas wilayah Jawa dan Sumatera menekankan pada aspek dokumentasi dan pelaporan insiden, namun belum mengaitkan langsung dampaknya terhadap mutu layanan atau keterlibatan sumber daya manusia (Surahmat, 2022). Selain itu, sebagian besar penelitian dilakukan sebelum diberlakukannya regulasi terbaru seperti Kepmenkes No. 165 Tahun 2023, sehingga belum merefleksikan perubahan standar akreditasi dan peran tim mutu secara komprehensif.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini akan secara khusus menggambarkan pelaksanaan SKP di Puskesmas Sandul, Kabupaten Seruyan, yang merupakan wilayah dengan karakteristik geografis dan sumber daya terbatas. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kesenjangan implementasi berdasarkan regulasi terbaru serta mengeksplorasi tantangan dan upaya yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan, sehingga dapat memberikan gambaran kontekstual yang lebih aktual, relevan, dan mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru dalam literatur keselamatan pasien di tingkat layanan primer, khususnya di daerah tertinggal.

Puskesmas Sandul yang merupakan bagian dari wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menghadapi tantangan

geografis, keterbatasan sumber daya manusia, serta infrastruktur pendukung yang belum optimal. Hal ini berdampak pada potensi kesenjangan dalam implementasi SKP, yang meliputi enam indikator utama: ketepatan identifikasi pasien, komunikasi efektif, keamanan penggunaan obat, ketepatan prosedur, pengendalian infeksi, dan pencegahan pasien jatuh. Berdasarkan hasil telaah awal dan laporan mutu internal, belum semua indikator tersebut mencapai target 100% sebagaimana ditetapkan secara nasional.

Pelaksanaan SKP di tingkat layanan primer seperti Puskesmas kerap menghadapi beberapa hambatan, antara lain: kurangnya pemahaman staf terhadap prinsip keselamatan pasien, lemahnya dokumentasi dan pelaporan insiden keselamatan, serta belum terbentuknya budaya keselamatan yang menyeluruh (Ariyanti, dkk., 2023). Jika sasaran keselamatan pasien tidak dijalankan dengan baik, dapat meningkatkan risiko terjadinya kejadian tidak diinginkan (KTD) yang berdampak buruk terhadap kondisi klinis pasien, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan, serta merugikan secara ekonomi dan reputasi institusi (Maduratna, dkk., 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pelaksanaan keselamatan pasien di rumah sakit, kajian yang secara khusus menyoroti implementasi enam sasaran keselamatan pasien di Puskesmas, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) seperti Kabupaten Seruyan, masih sangat terbatas. Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian yang perlu diisi dengan data empiris di tingkat fasilitas kesehatan primer.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam konteks lokal, karena memotret pelaksanaan SKP secara menyeluruh di Puskesmas Sandul, selama pelaksanaannya berdasarkan kondisi lapangan. Hasil penelitian ini penting sebagai dasar bagi manajemen Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam merancang strategi peningkatan mutu pelayanan yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana Persepsi Tenaga Kesehatan tentang

Pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien di Puskesmas Sandul Kabupaten Seruyan?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Menganalisis Persepsi Tenaga Kesehatan tentang Pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien oleh petugas kesehatan di Puskesmas Sandul Kabupaten Seruyan.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran persepsi tenaga kesehatan tentang identifikasi pasien dilakukan dengan benar pada petugas kesehatan di Puskesmas Sandul Kabupaten Seruyan.
- b. Mengetahui gambaran persepsi tenaga kesehatan tentang meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pemberian asuhan pada petugas kesehatan di Puskesmas Sandul Kabupaten Seruyan.
- c. Mengetahui gambaran persepsi tenaga kesehatan tentang meningkatkan keamanan terhadap obat-obat yang perlu diwaspadai pada petugas kesehatan di Puskesmas Sandul Kabupaten Seruyan.
- d. Mengetahui gambaran persepsi tenaga kesehatan tentang memastikan tepat pasien, tepat prosedur, dan tepat sisi pada pasien yang menjalani operasi/tindakan medis pada petugas kesehatan di Puskesmas Sandul Kabupaten Seruyan.
- e. Mengetahui gambaran persepsi tenaga kesehatan tentang meningkatkan kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan pada petugas kesehatan di Puskesmas Sandul Kabupaten Seruyan.
- f. Mengetahui gambaran persepsi tenaga kesehatan tentang mengurangi risiko pasien jatuh pada petugas kesehatan di Puskesmas Sandul Kabupaten Seruyan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang manajemen mutu layanan kesehatan, khususnya terkait implementasi Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian tentang keselamatan pasien di Puskesmas, terutama dalam konteks penerapan regulasi terkini seperti Kepmenkes No. 165 Tahun 2023.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Puskesmas Sandul

Penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan SKP di lapangan serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukungnya. Informasi ini bermanfaat untuk penyusunan perencanaan mutu, peningkatan kapasitas SDM, dan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan keselamatan pasien.

###### b. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan dasar dalam perumusan kebijakan pembinaan serta pendampingan Puskesmas secara lebih terarah dan efektif dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien.

###### c. Bagi Tenaga Kesehatan

Memberikan kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktif seluruh tim dalam implementasi SKP serta menumbuhkan budaya keselamatan pasien di lingkungan kerja masing-masing.

##### 3. Manfaat Sosial

Penelitian ini secara tidak langsung turut mendukung upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Dengan meningkatnya pelaksanaan keselamatan pasien, diharapkan risiko kejadian yang tidak diharapkan dapat ditekan, sehingga masyarakat merasa aman dan percaya terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan.